

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Kesejahteraan sosial**

##### **2.1.1 Pengertian kesejahteraan sosial**

Kesejahteraan sosial berasal dari dua kata yaitu sejahtera dan sosial. Sejahtera mempunyai arti suatu keadaan yang Makmur, aman atau selamat, bebas dari ancaman kemiskinan ataupun aman dari kebodohan, sedangkan sosial yang mempunyai arti berkerjasama dengan masyarakat sekitar. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan masyarakat yang sejahtera, aman, Makmur yang tertebas dari gangguan ataupun ancaman yang akan datang. Kesejahteraan sosial juga merujuk kepada kondisi dimana individu, kelompok dan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah dengan program-program kesejahteraan yang telah dibuat secara efektif dengan bekerjasamanya antarsistem sumber.

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Friedlander (1980) dalam (Fahrudin, 2014) mengartikan bahwa

kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi tersebut menjelaskan kesejahteraan sosial individu, kelompok ataupun masyarakat dapat dicapai apabila usaha-usaha sosial dan lembaga saling mendukung dan membantu untuk meningkatkan kemampuan dan fungsi sosial individu, kelompok masyarakat. Definisi lain menurut Wickenden (Fahrudin, 2012) menyatakan bahwa :

Kesejahteraan sosial mencakup undang – undang, program – program dan manfaat – manfaat dan pelayanan – pelayanan yang menjamin atau memperkuat perbekalan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sosial yang di akui sebagai dasar bagi kesejahteraan penduduk dan keberfungsian yang lebih baik dari tata sosial.

Definisi atas menjelaskan bahwa dalam kesejahteraan sosial didalamnya mencakup undang – undang, program -program, pelayanan – pelayanan sosial yang dibuat untuk masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya menjadi lebih baik lagi.

Dari dua konsep kesejahteraan sosial di atas bahwa dapat di artikan kesejahteraan sosial yaitu kesejahteraan sosial individu, kelompok ataupun masyarakat dapat dicapai apabila usaha-usaha sosial dan lembaga saling mendukung dan membantu untuk meningkatkan kemampuan dan fungsi sosial individu, kelompok masyarakat atau bisa juga kesejahteraan adalah suatu program yang ada di masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial agar dapat lebih baik.

### **2.1.2 Tujuan kesejahteraan sosial**

Kesejahteraan sosial tentu saja mempunyai tujuan untuk mencapainya penyesuaian diri yang lebih baik, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup dan

memelihara keberlangsungan hidup setiap masyarakat. Adapun tujuan kesejahteraan sosial menurut (Fahrudin, 2014) yaitu :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan lingkungan, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berdasarkan deskripsi tentang tujuan kesejahteraan sosial diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian atau tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar individu, kelompok dan masyarakat sehingga dapat hidup dengan layak dan bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat yang lingkungannya. Adapun tujuan lain dari kesejahteraan sosial menurut Schneiderman (1972) dalam (Fahrudin 2012) mengemukakan tiga tujuan utama kesejahteraan sosial yang tercemin dalam program kesejahteraan sosial yaitu :

1. . Pemeliharaan Sistem Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan system kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma- norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui

pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

2. Pengawasan Sistem Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah

3. Perubahan Sistem Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Berdasarkan tiga lingkup diatas menjelaskan bahwa tujuan kesejahteraan sosial didalamnya terdapat pemeliharaan sistem yang mana bertujuan agar menjaga nilai-nilai dan norma juga aturan-aturan sosial yang ada di masyarakat, serta pengawasan dan perubahan sistem kearah sistem yang lebih efektif bagi masyarakat.

### **2.1.3 Fungsi – fungsi kesejahteraan sosial**

Fungsi – fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan, mengurangi atau mengatasi masalah - masalah yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi dan menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander & Apte Dalam (Fahrudin, 2014)

Fungsi – fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain :

1. Fungsi pencegahan (*preventive*)  
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah – masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan- kegiatan untuk membantu menciptaka pola-pola baru dalam hubungan sosial serta Lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi penyembuhan (*curative*)  
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi Kembali secara wajar dalam masyarakat. Da;am fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi)
3. Fungsi pengembangan (*development*)  
Kesejahteaan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi penunjang (*supportive*)  
Fungsi ini mencankup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Fungsi – fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi kesejahteraan sosial yaitu mempunyai banyak fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat san mengembalikan keberfungsian sosial dan peran sosial dari suatu sistem yang sudah mengalami perubahan yang disebabkan oleh kepribadian ataupun sistem sosial.

#### **2.1.4 Pendekatan kesejahteraan sosial**

Banyak perkembangan dalam pendekaran kesejahteraan sosial untuk mengatasi masalah – masalah sosial. Pendekata sosial menuut Migley dalam (Fahrudin, 2014) yaitu :

1. Filantropi Sosial

Filantropi dalam sejarah awal kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan upaya-upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan para agmawan dan

relawan, yakni upaya yang bersifat amal (*charity*) dimana orang-orang menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk membantu orang lain, dimana pelaku filantropi disebut filantropis.

## 2. Pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial dalam pendekatan merupakan yang terorganisir untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga profesional yang telah memenuhi kualifikasi menangani masalah sosial, perkembangan pekerjaan sosial tidak lepas dari adanya filantropi, pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan profesional dan akademik yang cukup pesat dan telah menyebar di seluruh dunia.

## 3. Pendekatan Administrasi Sosial

Dilakukan oleh pemerintah dan berusaha mempromosikan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai macam program guna meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara, biasanya dengan penyediaan dan pengoptimalkan fungsi pelayanan sosial.

## 4. Pengembangan Sosial

Pendekatan ini memfokuskan pada suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi.

Dilihat dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari beberapa pendekatan yaitu filantropi sosial, pekerjaan sosial, administrasi sosial dan pembangunan sosial. Pendekatan

kesejahteraan sosial ini pada saat ini berkembang sesuai dengan kebutuhan program kesejahteraan sosial yang telah disusun oleh pendekatan sesuai dengan pendekatan yang telah di tentukan.

## **2.2 Konsep Pekerjaan Sosial**

### **2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial**

Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) pekerjaan sosial dalam buku (A. Fahrudin, 2014) (2018) dirumuskan sebagai berikut :

*“social work is the professional activity of helping individuals, group, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counvices; and participating in relevant legislative processes.*

*The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institution; and of the interaction of all these factors.”* (Dalam Zastrow, 2008, hal 5)

Artinya : pekerjaan sosial adalah kegiatan professional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan professional dari nilai- nilai, prinsip – prinsip, dan Teknik-teknik perkerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan- tujuan berikut : membantu orang memperoleh pelayanan- pelayanan nyata memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu – individu, keluarga – keluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau Kesehatan; dan ikut serta dalam proses – proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang institusi – institusi sosial, ekonomi, dan kultural; dan tentang interaksi antara semua faktor ini.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yang professional dalam membantu individu kelompok ataupun masyarakat dalam meningkatkan tujuan tujuan keberfungsian sosial. Pekerjaan sosial mempunyai atau

menerapkan nilai- nilai dan prinsip- prinsip atau Teknik -teknik yang memiliki berbagai tujuan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan banyak pengetahuan tentang institusi, ekonomi dan kultural budaya dan tentang intreraksi antara semua factor faktor tersebut.

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang professional yang diakui secara ilmiah yang berlandaskan pengetahuan dan peraturan yang diakui oleh negara karena mempunyai fungsi dan tujuan meningkatkan kesejahteraan osisak dan memperbaiki peningkatan kemampuan invidu, kelompok maupun masyarakat.

### **2.2.2 Unsur - Unsur Pekerjaan Sosial**

Menurut (Komorita, Neel, & Wagman 1962) dalam (Fahrudin, 2014) Pekerjaan sosial sebagai profesi mempunyai empat unsur utama, yang pada umumnya, tiga unsur di antaranya dikatakan sebagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tetapi kalau kita teliti lebih jauh sikap dan keterampilan sudah bersatu dengan individunya, sedangkan pengetahia terlepas dari individu untuk mengamati, merasakan, berpikir, dan bertindak dalam suatu cara tertentu terhadap suatu obejek tertentu. Sedangkan keterampilan adalah kemahiran dalam menerapkan pengetahuan dan dalam menggunakan metode dan Teknik tertentu.



### 2.2.3 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial mempunyai tujuan – tujuan untuk bisa mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Tujuan pekerjaan sosial menurut NASW dalam (Fahrudin, 2014)

1. Meningkatkan kemampuan- kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem - sistem yang memberikan kepada mereka sumber- sumber, pelayanan – pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefitian dan bekerja secara manusiawi dari sistem – sistem yang menyediakan orang dengan sumber – sumber dan pelayanan – pelayanan
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial (Zastrow,2008)

Selain keempat tujuan itu, Zastrow (2008) juga menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut :

5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk – bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
6. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber – sumber melalui advokasi dan Tindakan- Tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
7. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.

8. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Berdasarkan definisi tujuan di atas pekerjaan sosial merupakan profesi yang dituntut untuk meningkatkan keberfungsian sosial untuk memecahkan permasalahan klien. Menghubungkan orang dengan sistem sumber yang ada dan yang dibutuhkan juga memberikan perhatian dan ikut dalam membantu memperbaiki kebijakan sosial yang dirasa kurang menguntungkan terhadap masyarakat.

#### **2.2.4 Peran – Peran Pekerja Sosial**

Peran pekerja sosial dalam membantu klien menurut Bradford W Sheafordan dan Charles R. Horejsi dalam ((Suharto, 2014)) yaitu :

1. Peranan Sebagai Perantara ( Broker Roles)

Pekerja sosial menghubungkan anak asuh dengan sistem sumber terkait baik bantuan berupa materi maupun non materi yang ada di suatu badan, lembaga atau panti sosial. Sebagai perantara pekerja sosial juga harus berupaya untuk mencari suatu jaringan kerja dengan suatu organisasi yang dibutuhkan.

2. Peranan Sebagai Peningkat (Enabler Role)

Peranan sebagai peningkat ini yaitu peran pekerja sosial yang sering digunakan karena menggunakan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, keahlian, kapasitas dan kompetensi untuk dapat menolong dirinya sendiri. Pada peranan sebagai peningkat pekerja sosial juga berperan sebagai konselor yang berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan klien dapat

terpenuhi dan terjamin dengan mengidentifikasi tujuan, dan memfasilitas.

3. Peranan Sebagai Penghubung (Mediator Role)

Peranan sebagai penghubung ini merupakan untuk mencari kesepakatan sebagai penengah dalam perbedaan, konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok

4. Peranan Sebagai Advokasi (Advocator Role)

Peranan sebagai advokasi dilakukan oleh pekerja sosial berbeda dengan advokat hukum. Jika advokat hukum dalam tugasnya dituntut untuk sesuai dengan hukum yang ada di negara, sedangkan advokat pekerja sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari klien atau penerima manfaat

5. Peranan Sebagai Perunding (Conferee Role)

Peran pekerja sosial dengan perunding ini merupakan peranan yang dilakukan untuk bekerja sama antara pekerja sosial dengan klien yakni dalam pencarian data, pemberian gambaran pada korban.

6. Peranan Pelindung (Guardian Role)

Peran sebagai pelindung pastinya berperan sebagai melindungi klien atau penerima pelayanan juga orang-orang yang mempunyai risiko tinggi terhadap kehidupan sosial

7. Peranan Sebagai Fasilitasi (Fasilitator Role)

Peranan ini sangat penting dalam membantu meningkatkan keberfungsian sosial klien khususnya dengan kaitannya kebutuhan dan tujuan yang akan di capai dalam memecahkan permasalahan yang di hadapi klien

#### 8. Peranan Sebagai Inisiator (Inisiator Role)

Peranan ini berkaitan dengan memfokuskan atau memrikan perhatian terhadap masa lalu klien yang menjadi ptensi timbulnya masalah

#### 9. Peranan Sebagai Negosiator (Negotiator Role)

Peran ini bertindak kepada klien yang mengalami konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kesekPakatan Bersama antar kedua belah pihak berbeda dengan media tor yang netral,.

### **2.2.5 Metode Pekerjaan Sosial**

Pekerja sosial dapat dikatakan mempunyai tiga metode utama atau pokok yang berfungsi membantu guna memecahkan masalah yang ada. Metode tersebut adalah mikro (social casework), mezzo (social group work) dan makro (community organization/community development). Keterampilan yang penting dan harus dimiliki oleh seorang pekerja osial dalam melaksanakan praktiknya meneut National Association of Social Workers (NAWS) dalam ((A. Fahrudin, 2014)) :

- a. keterampilan dalam mendengarkan orang lain dengan pengertian dan tujuan
- b. keterampilan dalam mendapatkan informasi dalam mengumpulakn fakta yang sangat relevan bertujuan untuk mempersiapkan Riwayat sosial asesmen, dan laporan.

- c. Keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan pertolongan profesional dan dalam menggunakan diri sendiri dan hubungan
- d. Keterampilan dalam mengamati dan menafsirkan perilaku verbal dan nonverbal dalam menggunakan pengetahuan tentang teori kepribadian dan metode - metode diagnostic
- e. Keterampilan dalam menyertakan klien dalam usaha yang bertujuan untuk memecahkan masalah
- f. Keterampilan dalam mendiskusikan masalah yang ada secara emosional yang sensitive dalam cara yang mendukung tidak mengancam
- g. Keterampilan dalam menciptakan solusi dan inovatif atas kebutuhan – kebutuhan klien
- h. Keterampilan dalam menentukan kebutuhan untuk mengakhiri hubungan terapeutik dan bagaimana melakukannya.
- i. Keterampilan dalam menafikan temuan temuan penelitian dan literatur profesional
- j. Keterampilan memediasi dan negosiasi di antara pihak – pihak yang saling konflik
- k. Keterampilan dalam menyediakan pelayanan penghubung dari berbagai organisasi
- l. Keterampilan dalam menafsirkan atau mengkomunikasikan kebutuhan – kebutuhan sosial kepada sumber – sumber pemberi dana, public, atau apa legislator

Berkaitan dengan keterampilan – keterampilan di atas ini sangat penting, NASW juga mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk praktik pekerja sosial :

- a. kemampuan untuk berbicara dan menulis yang jelas
- b. kemampuan untuk mengajar orang lain
- c. kemampuan untuk merespon dan memberi dukungan dalam situasi krisis atau penuh emosi
- d. kemampuan untuk bertindak sebagai model peranan dalam hubungan profesional
- e. kemampuan menafsirkan gejala psikososial yang kompleks
- f. kemampuan untuk mengatur beban kerja memenuhi tanggung jawab
- g. kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk membantu orang lain
- h. kemampuan untuk menilai kinerja dan perasaan-perasaan sendiri, untuk menggunakan pertolongan dan konsultasi
- i. kemampuan untuk berpartisipasi dalam dan memimpin kegiatan – kegiatan kelompok
- j. kemampuan untuk berfungsi walaupun dalam keadaan stress
- k. kemampuan untuk menghubungkan teori sosial dan psikologis pada situasi praktik

#### 2.2.6 Fokus Pekerja Sosial

Fokus utama pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial (social Functioning), oleh karena itu keberfungsian sosial merupakan

konsepsi penting dalam pekerjaan sosial hal itu menjadikan pembeda dengan 42 profesi lainnya. Menurut Suharto (2005) Fokus keberfungsian sosial Terus mengalami kemajuan dan pergeseran dengan munculnya literatur yang mengangkat bukan saja menekankan isu fungsi-penyebab atau analisis situasi kasus sebagai seni, tapi mulai menengarai dan mericnci praktik yang berbasis teori. Praktek berbasis teori yang muncul adalah bukan hanya metode casework, tetapi juga groupwork dan community organization. Sebagian besar kelayan yang menjadi fokus perhatian bukan lagi orang-orang miskin, melainkan orang-orang kelas menengah dan atas yang mengalami masalah penyesuaian. Sedangkan menurut Dubois dan Miley dalam Suharto (2009) strategi pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan indivdu dalam menghadapi masalah yang dialami.
2. Menghubungkan sasaran atau klien dengan sistem sumber dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau dan memperoleh berbagai sumber, pelayanan, dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja dan fungsi lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berkeprimanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya ekonomi yang merata dan keadilan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas pekerjaan sosial memiliki perbedaan dengan profesi lainnya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh klien, pekerjaan sosial lebih spesifik dalam penanganan permasalahan dengan melibatkan lingkungan sosial disekitarnya serta keterkaitan dengan sistem sumber, lembaga pelayanan sosial terkait dalam peningkatan keberfungsian sosial individu klien.

### 2.2.7 Prinsip Pekerja Sosial

Prinsip Pekerjaan Sosial Menurut Mans dalam Fahrudin (2012) ada enam prinsip dasar dalam praktik pekerjaan sosial yaitu diantaranya:

1. Penerimaan (Acceptance)

Prinsip ini mengemukakan tentang pekerjaan sosial yang menerima klien tanpa "menghakimi" klien tersebut sebelum pekerja sosial tersebut menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat lebih percaya diri dan dengan demikian ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan kesulitan yang mengganjal di dalam pembicaraan

2. Komunikasi (Communication)

Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien maupun bentuk komunikasi non



verbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang baru.

### 3. Individualisasi (Individualisation)

Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi kliennya guna mendapatkan hasil yang diinginkan

### 4. Partisipasi (Participation)

Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerjasama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal

### 5. Kerahasiaan (Confidentiality)

Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan)

### 6. Kesadaran Diri Petugas (Worker Self Awareness)

Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan klien, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau

bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak "kaku" dalam percakapan dengan pekerja sosial.

Berdasarkan pengertian prinsip pekerjaan sosial diatas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan sosial memiliki prinsip Penerimaan (Acceptance), Komunikasi (Communication), Individualisasi (Individualisation), Partisipasi (Participation), Kerahasiaan (Confidentiality) dan Kesadaran Diri Petugas (Worker Self Awareness) yang mana dari ke enam prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya kepada klien

#### **2.2.6 Pekerjaan Sosial Dengan Kemiskinan**

Sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial sebagaimana dikemukakan oleh Soetarto (1992:6) dalam (Rustanto, 2014) dimana pekerja sosial melaksanakan tugas – tugas penyelesaian satu atau lebih fungsi praktik pekerjaan sosial antara lain :

1. Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memecahkan masalah mereka.
2. Menciptakan jalur hubungan oendahuluan diantara orang dengan sistem sumber.
3. Mempermudah interaksi, merubah, dan menciptakan hubungan baru diantara orang dengan sistem sumber kemasyarakatan.

4. Mempermudah interaksi, merubah dan menciptakan hubungan diantara orang – orang dilingkungan sistem sumber.
5. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijaksanaan dan perundang-undangan sosial.
6. Meratakan sumber – sumber material.
7. Bertindak sebagai kontrol sosial.

Dapat dilihat dari definisi di atas bahwa pekerja sosial juga mempunyai tugas yang penting dalam mengatasi kemiskinan membantu meningkatkan menggunakan sesuatu agar lebih efektif, menjadi jalur penghubung dari orang ke sistem sumber, memudahkan interaksi, merubah dan menciptakan hubungan baru, memberikan sumbangan terhadap perubahan, meratakan sumber, pekerja sosial juga bertindak sebagai kontrol sosial di masyarakat.

### **2.3 Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial di buat untuk melindungi, mengadakan perubahan atau menyempurnakan kegiatan Pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Perkembangan pelayanan sosial ini sangat cepat motivasi yang bermacam bermacam ragam diantara para penyusunannya dan besarnya beban kasus maupun tenaga yang terlibat di dalamnya menyebabkan perlunya menggunakan pelayanan sosial. Pelayanan ini lebih menjadi pelayanan yang di tujukan kepada suatu masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Menurut (Fahrudin 2012) menjelaskan tentang fungsi fungsi pelayanan sosial adalah :

1. pelayanan – pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan
2. pelayanan – pelayanan untuk terapi, pertolongan dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
3. Pelayanan pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi dan nasihat.

Pelayanan sosial yaitu suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu kelompok ataupun masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan- kebutuhannya, sehingga mereka dapat berkembang dan mereka bisa mendapatkan sebuah perlindungan.

Teknik keberfungsian sosial ini merupakan suatu pendukung fokus profesi pekerjaan sosial pada transaksi-transaksi manusia dalam lingkungannya. Hal ini merujuk kepada kemampuan baik kepada klien atau penerima bantuan/manfaat manusia dalam lingkungannya. Menurut Karls & Wandrei, 1998 dlm Fahrudin A hlm 10 menurutnya "Keberfungsian Sosial positif adalah kemampuan orang untuk menangani tugas-tugas dan aktivitasnya yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan peranan sosial utamanya sebagaimana yang diharapkan oleh kebudayaan dari suatu komunitas yang khusus." Pekerjaan sosial berhubungan dengan keberfungsian sosial semua orang namun pada prioritasnya yaitu pada masalah pemenuhan kebanyakan anggota-anggota masyarakat yang rentan. Siporin (1975) Fahrudin menurutnya "menyatakan bahwa keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas seperti keluarga, perkumpulan, komunitas dan sebagainya berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka". Untuk mencapai keberfungsian sosial maka peranan sumber daya menjadi hal yang sangat penting.

Kesempatan dan sumber-sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga memungkinkan pencapaian keberfungsian sosial sebagaimana mestinya. Seseorang dapat dikatakan berfungsi sosial apabila ia mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya melalui 3 cara yaitu:

1. Individu mampu menjalankan peranannya dengan baik. Peranan merupakan tingkah laku yang diharapkan keatas orang yang memegang peranan itu. Dalam hal ini individu dapat mengefektifkan segala sesuatu yang diharapkannya untuk diwujudkan secara konkret.
2. Individu memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Ia mampu membuat keputusan yang rasional, dapat dipercaya dan mampu berupaya untuk kesejahteraan orang lain. Hal-hal yang dicapainya akan dijadikan modal untuk kegiatan selanjutnya.
3. Individu memperoleh kepuasan diri dari penampilan/kinerjanya dan tugas serta pelaksanaan tanggung jawabnya.

## **2.3 Konsep Masalah sosial**

### **2.3.1 Pengertian Masalah Sosial**

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur – unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan – keinginan pokok warga kelompok sosial sehingga menyebabkan kepincangan ikatan (soerjono soekanto) dalam ((Pekei, 2019)), maka masalah sosial adalah ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan karena kegagalan mengadaotasikan diri untuk berperilaku dan berperan sesuai dengan harapan masyarakat.

Masalah sosial dapat diartikan suatu fenomena terjadinya di masyarakat yang merupakan ketimpangan yang ada di dalam masyarakat, factor – factor ketimpangannya disebabkan oleh factor ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Masalah sosial menurut ((soetomo, 2015)) yaitu

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki oleh karenanya wajar jika kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya.

Dalam pengertian di atas dapat menjelaskan bahwa keadaan banyak terdapat fenomena kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dan penyesuaian kembali dan adanya upaya untuk mengubah dan memperbaiki masalah sosial.

### **2.3.2 Karakteristik Masalah Sosial**

Masalah sosial dapat terjadi dikarenakan adanya kekurangan yang bersumber dari ekonomi, biologis, biopsikologis serta kebudayaan. factor ekonomi salah satunya yaitu kemiskinan. Dalam ((Huraerah, 2011)) masalah sosial memiliki karakteristik yaitu :

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada Batasan mengenai beberapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. jika suatu masalah mendapat

perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.

2. Kondisi dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonisme orang yang cenderung mengulang sesau yang menyenangkan dan menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisisebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tapi tidak oleh masyarakat lainnya.

3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menggagap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan rampai diperbincangkan dan diseminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial.

4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif, masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial,

karena penyebab dan akibatnya bersifat multimendisional dan menyangkut banyak orang

### **2.3.3 Komponen Masalah Sosial**

Ada beberapa komponen yang dapat memahami arti masalah sosial yang sesungguhnya. Seperti yang dikemukakan oleh Partillo yang diambil dari ((Huraerah, 2011)) menyatakan, ada empat komponen yaitu :

1. masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu
2. dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau mental, baik pada individu ataupun masyarakat
3. merupakan pelanggaran terhadap nilai – nilai atau standar sosial dari atau beberapa sendi kehidupan masyarakat
4. menimbulkan kebutuhan akan pemecahan

Dari beberapa komponen yang sudah disebutkan bahwasanya masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila masyarakat merasa bahwa itu suatu masalah tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat luas, melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat, dan masalah tersebut membutuhkan aturan yang lebih sejahtra.

### **2.4 Konsep Implementasi**

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu yang telah direncanakan yang disusun dengan rapih secara matang dan terperinci. Implementasi tidak jarang dilakukan setelah perencanaan yang dianggap benar, tepat dan mempunyai tujuan yang jelas.



### **2.4.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah salah satu yang penting dalam suatu proses perencanaan, tanpa adanya implementasi suatu Tindakan yang memiliki tujuan tidak akan dicapai atau tercapai dengan sesuai rencana.

Menurut Gordon yang telah dikutip di ((Mulyadi, 2015)) menjelaskan bahwa :

“ implementasi berkenaan dengan bebrbagai kegiatan yang di ataskan pada realisasi program”

Sedangkan menurut Wahab 2004 yang dikutip dari ((Pranomo, 2020)) implementasi dapat di artikan :

“Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantsnya terkait dengan kata kerja kbijaksanaan”

Secara lebih sederhana implementasi bisa di artikan dengan pelaksanaan atau penerapan. Berdasarkan beberapa definisi di atas yang sudah di desfinisikan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan dapat memperoleh suatu hasil yang sangat sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan yang sudah di tetapkan.

### **2.4.2 Tahapan Implementasi**

Implementasi dalam program memiliki beberapa tahapan implementasi dikutip dari (Rahayu, 2012) tahapan implementasi terbagi menjadi 3 tahapan :

- a. menggambarkan rencana suatu program dengan menetapkan tujuan yang jelas menentukan standar pelaksanaan, menentukan biaya yang akan digunakan dan waktu pelaksanaannya
- b. pelaksanaan program dengan mendayakunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya dan metode.
- c. Menentukan jadwal yang akan dilaksanakan, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin keberlangsungan atau kelancaran pelaksanaan program. Sebab itu jika terdapat penyimpangan dapat dengan segera mengambil tindakan yang sesuai.

Apabila hal hal yang telah di sebutkan diatas dilakukan dengan benar-benar serta bersungguh – sungguh, maka implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan perencanaan dan penetapan waktu serta pengawasan

## **2.5 Konsep Bantuan sosial**

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial (*social security*) yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. (Suharto, 2013) Target utama kelompok rentan dan kurang beruntung untuk bantuan sosial orang dengan kecacatan fisik dan/ atau mental etnik minoritas, KAT, korban penyalahgunaan Narkoba, yatim piatu, orang tua tunggal, pengungsi, korban bencana alam/sosial, janda, lanjut usia terlantar.

Bantuan sosial, atau kerap disebut juga bantuan public (*public assistance*) dan pelayanan kesejahteraan (*welfare services*) mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditujukan untuk membantu atau melindungi individu,

keluarga dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar yang meningkatkan kualitas hidupnya . (Suharto, 2009) Skema Bantuan sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara memangkas kemiskinan secara langsung. Bantuan sosial sosial antara lain berbentuk penyediaan pelayanan sosial dan kesejahteraan bagi kelompok rentan; pemberian berupa uang dan barang, seperti kupon makan dan tunjangan keluarga; serta pemberian subsidi semenyata, seperti subsidi perumahan atau kebijakan yang mendukung diturunkannya harga barang – barang pokok selama krisis,

Desain program bantuan sosial yang efektif dan efisien, erat kaitannya dengan kemampuan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan *eligibility* (kelayakan), penerima bantuan (misalnya batas usia maksimal penerima bantuan serta kondisi kewarganegaraan), *entitlement*, hak yang seharusnya diperoleh penerima (misalnya seseorang yang berada di bawah garis standar kebutuhan, atau melalui *means testing*, yakni tes kepemilikan/kekayaan seseorang untuk menentukan berhak tidaknya seseorang memperoleh bantuan pemerintah, bantuan penentu target penerima bantuan), serta *administration* (seperti sistem peminjaman klaim, dan hal yang berhubungan dengan sistem administrasi lainnya). (Suharto, 2011)

Pemberian bantuan sosial yaitu upaya yang ditujukan agar meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki seseorang, keluarga dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan

kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara seharusnya dengan wajar. Bantuan sosial memberikan dalam bentuk uang, barang dan atau jasa.

Bantuan sosial dapat di bedakan melalui sifatnya yaitu sementara dan keberjalnjutan. Bantuan sosial yang bersifat sementara yaitu pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial, sehingga tidak termasuk kedalam kriteria penerima bantuan sosial. Sedangkan bantuan sosial berkelanjutan merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk memertahankan kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandueuan. Penyelenggara bantuan sosial diantaranya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

Dalam penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa program jaminan sosial (*social security*) yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara memangkas kemiskinan secara langsung. Bantuan sosial sosial antara lain berbentuk penyediaan pelayanan sosial dan kesejahteraan bagi kelompok rentan; pemberian berupa uang dan barang, seperti kupon makan dan tunjangan keluarga; serta pemberian subsidi semenyata, seperti subsidi perumahan atau kebijakan yang mendukung diturunkannya harga barang – barang pokok selama krisis,

## **2.6 Bantuan Pangan Non Tunai**

### **2.6.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai**

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan, yang selama ini melalui Program Raskin agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk nontunai dari pemerintah kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk mendapatkan Bahan pangan.

Tenaga Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah tenaga pelaksanaan sosial yang bertugas mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan Proram BPNT (mencakup sosialisai, registrasi, penggantian data, dan pengaduan).

### **2.5.2 Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

### **2.5.3 Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai**

Program Bantuan Pangan Non Tunai mempunyai beberapa tujuan salah satunya untuk mengurangi kemiskinan. Menurut (P. Maharani, 2019) Program bantuan pangan non tunai mempunyai tujuan yaitu :

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
3. Meningkatkan ketepatan sasaran Waktu, Jumlah, harga, kualitas dan administrasi
4. Memeberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan Pangan

#### **2.5.4 Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai**

Program Bantuan Pangan Non Tunai dibuat oleh pemerintah agar mempunyai tujuan untuk masyarakat. Menurut (P. Maharani, 2019) manfaat program bantuan non tunai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
4. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. ((P. Maharani, 2019)

Definisi diatas menjelaskan bahawa BPNT ini banyak manfaatnya bagi masyarakat. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai ini dapat meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, meningkatkan transaksi nontunai dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **2.5.5 Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai**

Penerima manfaat BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah di daerah pelaksana, atau di sebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang namanya harus termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat ( DPM ) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. DMP BPNT bersumber dari adanya data terpadu kesejahteraan sosial yang dapat di akses oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BPS)

Daftar Penerima Manfaat ( DMP) BPNT yang telah difinalisasi oleh pemerintah Daerah dan disahkan oleh Bupati/Walikota harus dilaporkan kepada kementerian sosial melalui aplikasi SIKS-NG di menu BPS. Unit penerima manfaat dari program BPNT yaitu keluarga. Namun, untuk kebutuhan penyaluran BPNT perlu ditentukan satu nama dalam KPM sebagai pengurus KPM yang akan menjadi pemilik rekening BPNT. Pengurus KPM ditentukan menurut urutan Prioritas sebagai berikut:

- 1) Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga ataupun sebagai pasangan kepala keluarga.
- 2) Jika tidak ada perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga ataupun sebagai pasangan kepala keluarga, maka Pengurus KPM adalah anggota keluarga perempuan yang berumur di atas 17 tahun dan sudah memiliki dokumen identitas



- 3) Jika KPM tidak memiliki anggota perempuan di atas 17 tahun, maka Pengurus KPM adalah laki-laki kepala Keluarga.
- 4) Jika laki – laki kepala keluarga tidak ada, maka dapat diajukan anggota keluarga laki- laki yang berumur di atas 17 tahun dan sudah mempunyai dokumen identitas kependudukan sebagai pengurus KPM.
- 5) Jika KPM tidak mempunyai anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun keatas dan memiliki dokumen identitas kependudukan, maka KPM dapat diwakili oleh anggota keluarga lainnya dalam satu kartu keluarga ( KK) atau wali yang belum terdaftar dalam KPM BPNT sebagai pengurus KPM.
- 6) Bagi KPM yang merupakan penerima PKH, Maka yang dimaksud sebagai pengurus KPM BPNT merujuk pada individu yang telah ditetapkan sebagai pengurus PKH.

## **2.7 Konsep Kemiskinan**

### **2.7.2 Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan adalah satu masalah sosial yang erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Kemiskinan adalah masalah sosial yang paling dikenal orang. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa kemiskinan akar dari masalah sosial. Secara harfiah menurut Poerwardarminta (1976) dalam (Rustanto, 2015a), kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Menurut kuncoro (1997 : 102-103) dalam (Rustanto, 2014) bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum, “tidak berharta-benda”. Kemiskinan juga bisa di sebut dengan masalah sosial.

### **2.7.2 Penyebab Kemiskinan**

Ada beberapa penyebab kemiskinan, diantaranya tingkat pengangguran yang tinggi; tingkat kesehatan fisik yang memprihatinkan ; keterbatasan fisik atau mengalami kecacatan; masalah- masalah yang berkaitan dengan kondisi emosi; keterlambatan perkembangan mental; biaya Kesehatan yang sangat tinggi; ketergantungan alkohol; kecanduan pada obat-obatan; keluarga dengan jumlah anggota yang besar; rendahnya tingkat pendidikan; ketidaksesuaian pekerjaan karena otomatisasi; kurangnya keahlian untuk bekerja; perempuan yang menjadi kepala keluarga dengan anak-anak yang masih kecil; tidak adanya pendapatan tambahan bagi mereka yang berpendapatan tetap; diskriminasi rasial; mendapat label ‘eks nabi’ atau ‘gila’; hidup dalam lingkungan yang sulit memperoleh pekerjaan; perceraian; desersi, atau kematian pasangan; perjudian; masalah anggaran dan kesalahan dalam mengatur pengeluaran; diskriminasi seksual; korban kejahatan; pemegang prinsip anti-bekerja; menganggur; pekerjaan dengan upah rendah; dan usia tua. (Suharto, 2011)

Kemiskinan mengakibatkan adanya sifat masalah, kurangnya kemampuan intelektual, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan dan rendahnya kemampuan pada individu tersebut untuk merenpon persoalan yang di alami dalam kehidupannya sehingga ia mengaami kesukulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Hikmat (2005) dalam Hafsat (2008) mengemukakan bahwa faktor kemiskinan data di kategorikan kedalam dua hal yaitu :

a. Faktor internal

- fisik (cacat, kyurang gizi, sakit- sakitan)
- intelektual (kurangnya pengetahuan, kekurangan informasi)
- mental emosional (malas, mudah menyerah, putus asa, temperamental)
- spiritual ( tidak jujur, serakah, tidak disiplin )
- sosial psikologis (kurang motivasi, kurang percaya diri, kurang relasi, depresi)
- keterampilan (tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja)
- asset (tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah tabungan kendaraan dan modal kerja)

b. faktor eksternal

- terbatasnya pelayanan sosial dasar
- tidak dilindungi hak atas kepemilikan tanah
- teratasknya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha – usaha sector informal

- kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro
- belum terciptanya sistem ekonomi usaha mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro
- sistem mobilisasi dan pendayagunaan dan sosial masyarakat yang belum optimal
- dampak sosial negatif dan program penyesuaian struktural
- budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan
- kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana
- pembeanginan yang lebih berorientasi fisik material
- pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata
- kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

### **2.7.3 Indikator Kemiskinan**

Indikator Kemiskinan Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas (Nurchaya & Alexandri, 2020).

Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah:

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan.

Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan sar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahal biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.

3. Keterbatasan akses Pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahal biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh Pendidikan.

4. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan

5. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.

6. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.

7. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan

8. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup,

rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumberdaya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.

9. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.

10. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

11. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup

#### **2.7.4 Pendekatan kemiskinan**

Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan, pendekatan absolut dan pendekatan relative (Zastrow, 2000a; Zastrow, Zastrowb; Suharto)

##### **a. Kemiskinan Absolut**

Menurut pendekatan absolut apabila pendaotannya di bawah garis kemiskinan atau indivisu dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan dasar hidup yakni sejumlah asuoan kalori misalnya 2100 kalori.

##### **b. Kemiskinan Relatif**

Menurut pendekatan relatif menyebutkan bahwa seseorang dapat dikatakan miskin apabila pendapatannya berada dibawah pendapatan rata-rata masyarakat. Menurut pendekatan ini, kemiskinan disebabkan karena adanya perbedaan pendapatan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya atau antara suatu waktu dengan waktu lainnya atau dapat dikatakan bahwa kondisi kemiskinan tergantung kepada kondisi suatu masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas kemiskinan mempunyai dua pendekatan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut itu individu dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan dasar hidup yakni sejumlah asupan kalori misalnya 2100 kalori.. Sedangkan, kemiskinan relative apabila pendapatannya berada dibawah pendapatan rata-rata masyarakat. pendekatan ini, kemiskinan karena adanya perbedaan pendapatan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya atau antara suatu waktu dengan waktu lainnya atau dapat dikatakan bahwa kondisi kemiskinan tergantung kepada kondisi suatu masyarakat.

## 2.8 Kerangka Konseptual

